

Persepsi dan Perilaku Organisasi pada SKPD dalam Pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang

Kurnia Hardjanto¹, Wing Wahyu Winarno²

Abstract — Bad perceptions of conventional procurement of goods and services in government offices, with all of its problems, make some government officials are reluctant to become committee or electronic procurement officials. E-Procurement systems have an impact on organizational behaviour in government procurement of goods and services. This study aims to determine the perception of e-Procurement systems and organizational behaviour changes that occur in the implementation of e-Procurement in Kota Magelang. This research uses survey method, where respondents fill out a questionnaire related to the research variables. Respondents are employees involved in the activities of e-Procurement in Kota Magelang, They are *Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)*, *Unit Layanan Pengadaan (ULP)* and LPSE staff members, with total respondents are 40 peoples. Six hypotheses are tested using PLS and all of them supported by analysis of data

Intisari — Persepsi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah konvensional yang sarat dengan permasalahan masih menjadi penyebab sebagian aparat pemerintah enggan menjadi panitia atau pejabat pengadaan berbasis elektronik. Sistem *e-Procurement* memberikan dampak pada perilaku organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Makalah ini disusun untuk mengetahui persepsi tentang sistem *e-Procurement* serta perubahan perilaku organisasi yang terjadi pada pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang. Metode yang dilakukan berupa survei, yaitu responden mengisi lembar kuesioner yang telah disusun berdasarkan variabel penelitian. Responden adalah pegawai yang terlibat dalam kegiatan *e-Procurement* di Kota Magelang, terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengelola LPSE, dengan total responden berjumlah 40 orang. Enam hipotesis diuji menggunakan program PLS dan keseluruhan hipotesis dinyatakan diterima berdasarkan analisis data.

Kata kunci: *e-Procurement*, Persepsi, Perilaku Organisasi, Kota Magelang

I. PENDAHULUAN

Pengadaan elektronik (*E-Procurement*) merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Mulai tahun 2008, instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mulai menerapkan sistem *e-Procurement* di pemerintahannya yang dinamakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan pengadaan barang dan

jasa secara elektronik dengan pihak penyedia barang dan jasa selaku pelaku usaha [1].

Implementasi model *e-Procurement* diharapkan dapat meminimalkan masalah-masalah yang muncul pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, antara lain proses pengadaan akan lebih menghemat waktu dan biaya [2], memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan [3], sehingga akan tercipta suatu proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien [4]. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain penunjukan langsung, barang atau pekerjaan fiktif, eskalasi, kontrak *lump sum*, barang tidak sesuai spesifikasi, rekayasa lelang, KKN atau persengkokolan, pinjam bendera dan memecah atau menyatukan paket [5]. Hal tersebut membentuk persepsi tersendiri bagi aparat pemerintah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Persepsi ini yang memicu para pejabat dan pegawai untuk tidak bersedia menjadi pengelola pengadaan di instansinya, baik itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan maupun menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) [6].

Implementasi *e-Procurement* juga membawa konsekuensi perubahan pada organisasi pemerintah daerah. Sejak tahun 2008, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan *e-Procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada awal pelaksanaan *e-Procurement*, penumbuhan budaya organisasi dirasa sangat penting. Hal tersebut untuk menciptakan kesadaran kolektif dan mengembangkan identitas organisasi yang baru [3]. Pelaksanaan *e-Procurement* juga membawa dampak pada perubahan kelembagaan organisasi pemerintah yang menjadi faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Yogyakarta [7]. Implementasi *e-Procurement* juga berdampak pada pengembangan organisasi di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Strategi pengembangan organisasi dilakukan melalui reformasi administrasi untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan yang efektif dan efisien [8].

Pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan *e-Procurement* dalam kegiatan *pengadaan* barang dan jasa mulai tahun 2011. LPSE Kota Magelang dibentuk dengan koordinator dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Magelang dan melayani kegiatan *e-Procurement* untuk seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Magelang. Regulasi pembentukan LPSE di Kota Magelang adalah Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Magelang. Portal LPSE Kota Magelang memiliki alamat <http://lpse.magelangkota.go.id/eproc/> dengan tampilan halaman muka seperti pada Gbr. 1

¹Pelaksana, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang (telpon: 0293-362384; e-mail: kurnia_ha@yahoo.com)

²Dosen Tetap, Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta (e-mail: maswing@gmail.com)



Gbr. 1 LPSE Kota Magelang.

Jumlah kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang dikelola LPSE Kota Magelang hingga akhir tahun 2014 adalah sejumlah 157 paket dengan personil pengadaan berjumlah 20 orang. Secara umum, kendala keterbatasan jumlah ahli pengadaan bersertifikat di Kota Magelang disebabkan oleh masih adanya persepsi tentang sistem pengadaan sebelumnya (pengadaan konvensional), antara lain mudahnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang serta kurang transparan [9], sehingga membuat aparat pemerintah daerah khawatir atau enggan terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar tidak terkena masalah hukum. Hal ini yang menjadikan personel pengelola pengadaan yang ada di Kota Magelang menanggung beban pekerjaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlebih setiap tahunnya (Data LPSE Kota Magelang 2014).

Implementasi *e-Procurement* di Kota Magelang juga membawa dampak perubahan pada organisasi SKPD. Dukungan pemerintah daerah terhadap *e-Procurement* salah satunya dengan dikeluarkannya regulasi berupa Peraturan Walikota yang mengatur tentang LPSE beserta *Standard Operating Procedure* (SOP) LPSE Kota Magelang. Regulasi tersebut diberlakukan untuk seluruh SKPD yang memiliki kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui *e-Procurement*. Kinerja dan capaian target penyerapan anggaran antara lain ditentukan oleh keberhasilan SKPD dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, perlu dilihat adanya pengaruh pelaksanaan *e-Procurement* dalam membentuk persepsi aparat pemerintah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut juga untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sudah dilakukan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel [10]. Selain itu, perlu juga diketahui perubahan perilaku organisasi pada SKPD di Kota Magelang dalam implementasi *e-Procurement*, terutama dalam membentuk persepsi aparat pemerintah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Penelitian tentang dampak implementasi *e-Procurement* terhadap organisasi telah banyak dilakukan, dan sebagian besar merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian oleh

Udayono [11], Adiningsih [12], dan Fachrurozin [13] menjelaskan pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap organisasi dengan metode deskriptif kualitatif dengan responden adalah pegawai yang terlibat dalam kegiatan *e-Procurement*. Penelitian dampak implementasi *e-Procurement* di perusahaan dilakukan oleh Hardiansyah [14] dan Sari [15] dengan metode kuantitatif menggunakan daftar pertanyaan dan kuesioner serta responden adalah karyawan atau unit yang terlibat dalam *e-Procurement*.

Persepsi sistem *e-Procurement* lebih banyak dilihat sebagai dampak penggunaan sistem secara langsung oleh pengguna layanan. Persepsi pengguna sistem *e-Procurement* dilihat menggunakan metode kuantitatif antara lain dengan model DeLone & McLane *IS Success* [16][17] dan *Technology Acceptance Model* [18][19]. Hadinata meneliti dampak sistem *e-Procurement* terhadap organisasi dan pengguna layanan menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) [20]. Makalah ini akan melihat perubahan organisasi dan persepsi aparat pemerintah yang muncul dalam implementasi *e-Procurement*. Metode yang digunakan bersifat kuantitatif dengan menyusun model perilaku organisasi dan persepsi terhadap *e-Procurement* yang belum dilakukan sebelumnya.

II. ELECTRONIC PROCUREMENT

A. E-Procurement

Electronic Procurement (e-Procurement) adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [10]. Menurut Croom & Jones, *e-Procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet (terintegrasi) untuk melaksanakan tahapan proses pengadaan termasuk pencarian, *sourcing*, negosiasi, pemesanan, penerimaan dan meninjau pascapembelian secara terpisah atau serentak [21].

Pelaksanaan *e-Procurement* dalam organisasi bertujuan untuk:

- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- mendukung proses monitoring dan audit;
- memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time*.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sistem *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Magelang melibatkan beberapa pihak yaitu [22]:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
- Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Penyedia Barang dan jasa

B. Persepsi Sistem E-Procurement

Persepsi merupakan suatu proses individu atau kelompok mengorganisasikan dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungannya [23]. Perilaku individu atau

kelompok dituntun atau didasari oleh bagaimana individu tersebut mempersepsikan semua stimulus yang datang dari lingkungan, yang terkadang persepsi individu atau kelompok tersebut tidak menunjukkan situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik (*e-Procurement*) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengadaan. Penerapan dan penggunaan *e-Procurement* dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa memberikan dampak perubahan pada organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif [21][24]. Hal tersebut mempengaruhi persepsi pengguna sistem *e-Procurement* tentang efektivitas kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah [25]. Persepsi yang muncul sebagai dampak implementasi dan penggunaan *e-Procurement* ditunjukkan pada Gbr. 2.



Gbr. 2 Dampak *e-Procurement* menurut Nurdin (2014).

Efektivitas pelaksanaan *e-Procurement* antara lain mengurangi peluang kolusi dan korupsi [26], meningkatkan transparansi [11][17][18], mengurangi biaya pengadaan [29], meningkatkan kepedulian penyedia dan penetrasi informasi ke pasar [28], serta efisiensi waktu [2]. Hal ini juga sejalan dengan tujuan *e-Procurement* dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time*.

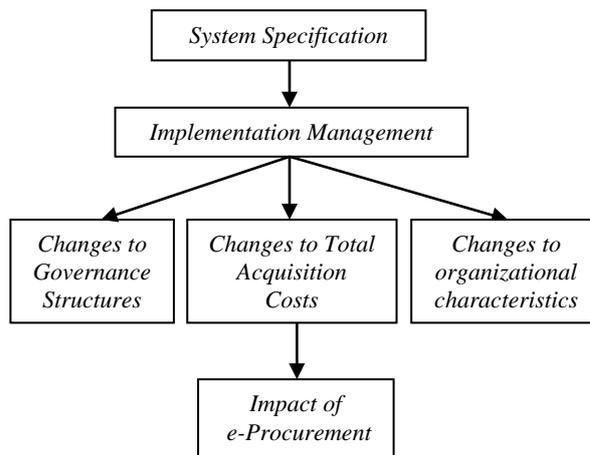
C. Perilaku Organisasi

Perilaku Organisasi merupakan studi yang menganalisis sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi [23]. Elemen-elemen kunci dalam perilaku organisasi adalah manusia, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi.

Sistem pengadaan elektronik (*e-Procurement*) merupakan perkembangan penting dalam kegiatan pengadaan barang maupun jasa suatu organisasi. Penerapan *e-Procurement* berdampak pada hubungan relasional faktor internal maupun eksternal yang terdapat pada organisasi. Secara internal, karakteristik organisasi dan pengaruh organisasi merupakan faktor pendorong yang kuat dalam penggunaan *e-Procurement*. Sistem tersebut telah mampu memberikan manfaat bagi organisasi, di antaranya peningkatan efisiensi proses dan pengurangan harga [30].

E-Procurement mengacu pada penggunaan sistem komunikasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh proses pengadaan dalam organisasi. Croom dan Brandon-Jones [21] mengidentifikasi lima topik utama yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-Procurement*, yaitu perubahan total biaya akuisisi (*changes to total acquisition*

costs), perubahan karakteristik organisasi (*changes to organizational characteristics*), perubahan struktur tata kelola (*changes to governance structures*), spesifikasi sistem (*system specification*) dan manajemen implementasi (*implementation management*). Kelima hal tersebut dikembangkan menjadi suatu model untuk menjelaskan efek *e-Procurement*. Adapun model efek *e-Procurement* dapat dilihat dalam Gbr. 3 sebagai berikut.



Gbr. 3 Model *e-Procurement Effect*.

- a. *Changes to Total Acquisition Costs*
Biaya akuisisi merupakan biaya pembelian atau pengadaan dalam penggunaan sistem *e-Procurement* dibandingkan sistem sebelumnya. *E-Procurement* telah memberikan kontribusi penting dalam mengurangi jumlah biaya beberapa proses pengadaan. Sistem *e-Procurement* juga lebih efisien dan menjadi cara yang dapat diandalkan untuk proses permintaan pembayaran dibandingkan proses manual atau semi otomatis.
- b. *Changes to Organizational Characteristics*
Sistem *e-Procurement* telah memberikan perubahan perilaku dan hubungan pada organisasi dalam pelaksanaan proses pengadaan. Penerapan sistem baru membutuhkan upaya dan waktu untuk melatih, mendidik dan memberikan motivasi pengguna untuk percaya bahwa sistem baru dapat menyelesaikan masalah dengan cepat jika digunakan dengan cara yang benar. Dalam hal ini, terjadi perubahan karakteristik organisasi.
- c. *Changes to Governance Structures*
Pengaruh peningkatan pengiriman informasi dan akses pengguna pada proses pengadaan melalui sistem *e-Procurement* memiliki dampak yang signifikan terhadap konfigurasi dan struktur tata kelola pengadaan. Struktur tata kelola transaksional yang terjadi pada proses pengadaan dapat mempengaruhi pembeli dan hubungan dengan penyedia.
- d. *System Specification*
Spesifikasi sistem menjadi masalah penting dalam implementasi *e-Procurement*. Sistem *e-Procurement* diharapkan dapat berintegrasi secara efektif dengan sistem informasi lainnya, terutama perencanaan dan pengendalian produksi serta sistem keuangan. Integrasi

sistem juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi *e-Procurement*, termasuk penyediaan infrastruktur informasi ke pelanggan dan hubungan ke penyedia

e. Implementation Management

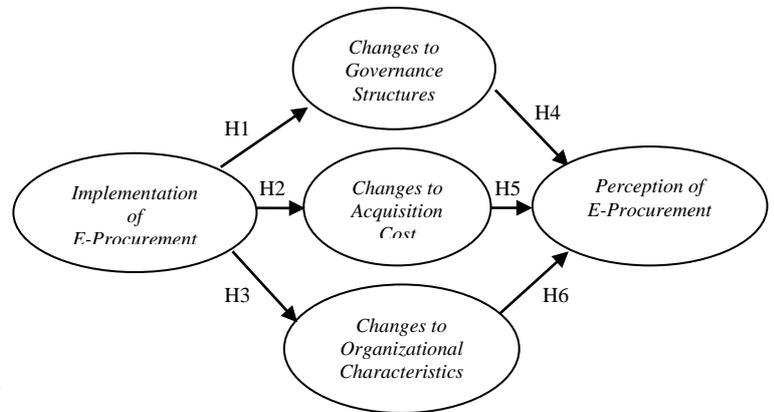
Manajemen implementasi menitikberatkan pada proses penggunaan *e-Procurement* pada organisasi, berfokus pada bagaimana sistem dirancang kemudian disampaikan kepada pengguna untuk mendukung proses pengadaan. Sistem juga dikembangkan untuk meningkatkan jumlah pengguna dan penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan. Spesifikasi dan manajemen sistem merupakan dua hal penting dalam implementasi *e-Procurement* pada suatu organisasi.

Hidayanto *et al* (2012) mengadopsi model *e-Procurement effect* untuk menganalisis dampak implementasi *e-Procurement* di PT PLN (Persero) Indonesia. Variabel *implementation of e-Procurement* digunakan untuk mengetahui *system specification* dan *implementation management* serta adanya perubahan indikator pada variabel *changes to acquisition cost*. Selain itu, tambahan enam variabel baru yaitu *pre-sourcing business process*, *procurement quotation*, *negotiation*, *order placement*, *transaction* dan *post-delivery* dalam model. Penggunaan *e-Procurement* menyebabkan perubahan kinerja organisasi PT PLN di daerah-daerah. *E-Procurement* di PT. PLN memberikan dampak signifikan terhadap total biaya akuisisi, karakteristik organisasi, struktur tata kelola, proses bisnis *pre-sourcing*, dan kuota pengadaan [31].

Penelitian oleh Kalianan *et al* (2009) melihat pengaruh adopsi *e-Procurement* terhadap keterlibatan dan persepsi pengguna dalam konteks organisasi. Empat variabel utama yang dianalisis yaitu kepemimpinan organisasi, manfaat yang dirasakan organisasi, kemudahan penggunaan dan, fasilitator organisasi. Perspektif organisasi memainkan peran penting dalam memastikan tingkat keberhasilan adopsi dan penggunaan sistem [24]. Gunasekaran dan Ngai melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan organisasi terhadap implementasi *e-Procurement* pada perusahaan. Perubahan organisasi yang terjadi antara lain pada dukungan pimpinan dan komitmen organisasi dalam penerapan sistem *e-Procurement* [2].

D. Hipotesis

Makalah ini didasarkan pada konstruk model *e-Procurement effects* yang dikemukakan oleh Croom and Brandon-Jones (2007) dengan variabel yang digunakan adalah *e-Procurement implementation*, *changes in governance structure* dan *changes in organizational characteristic* serta perubahan pada variabel *changes in acquisition cost*, seperti yang dikemukakan oleh Hidayanto *et. al.* (2012). Sedangkan variabel *impact of e-procurement* berupa *perception of e-Procurement* seperti yang dikemukakan oleh Nurdin (2014). Secara diagram konstruk model dapat digambarkan seperti yang tampak pada Gbr. 4.



Gbr. 4 Konstruk Model Penelitian.

Hipotesis atas persepsi dan perilaku organisasi pada pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 (H1): *Implementation of E-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Changes to Governance Structures*.
- Hipotesis 2 (H2): *Implementation of E-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Changes to Acquisition Cost*.
- Hipotesis 3 (H3): *Implementation of E-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Changes to Organizational Characteristic*.
- Hipotesis 4 (H4): *Changes to Governance Structures* berpengaruh positif terhadap *Perception of e-Procurement*.
- Hipotesis 5 (H5): *Changes to Acquisition Cost* berpengaruh positif terhadap *Perception of e-Procurement*.
- Hipotesis 6 (H6): *Changes to Organizational Characteristic* berpengaruh positif terhadap *Perception of e-Procurement*.

III. METODOLOGI

A. Subjek Survei

Makalah ini dibuat dari penelitian survei, yaitu data diperoleh langsung dari responden dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data [32]. Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi dan perilaku organisasi pada satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang. Responden adalah pihak pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang, yaitu PPKom, ULP dan pengelola LPSE. Secara keseluruhan, responden yang terlibat berjumlah 40 orang.

Makalah ini juga menggunakan data pendukung berupa regulasi, kebijakan maupun dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Magelang. Data tersebut bersumber dari LKPP, LPSE, ULP maupun organisasi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Magelang.

B. Instrumen Survei

Survei dilakukan terhadap responden dengan mengisi kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Materi kuesioner berupa identitas responden beserta keterlibatannya dalam kegiatan *e-Procurement* serta pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Responden mengisi 29 pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Tujuan survei ini adalah mengetahui persepsi dan perilaku organisasi pengadaan di Kota Magelang. Tabel I menunjukkan instrumen kuesioner lengkap dengan variabel beserta indikatornya. Terdapat lima variabel laten secara keseluruhan. Setiap pertanyaan diberi skor atau nilai menggunakan skala likert [33] yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S) dan 5 = Sangat Setuju (SS).

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equating Modeling* (SEM), yaitu metode statistik untuk menganalisis variabel dependen dan independen secara langsung [34]. Analisis SEM dilakukan menggunakan piranti lunak (*software*) statistik yaitu smartPLS.

1) Model Pengukuran

Analisis model pengukuran digunakan untuk menganalisis kecukupan ukuran reliabilitas dan validitas. Salah satu ukuran reliabilitas adalah reliabilitas *item* atau nilai faktor *loading* indikator tertentu untuk variabel latennya. Menurut Henseler *et al* [35], nilai minimum faktor *loading* untuk analisis selanjutnya adalah 0,7.

TABEL I
INSTRUMEN KUESIONER

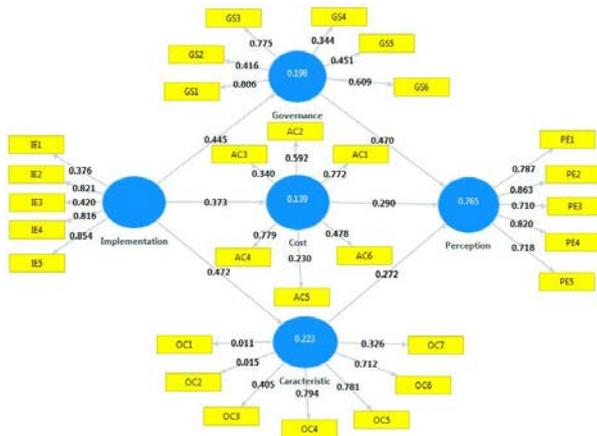
<i>Implementation of e-Procurement</i>	Sistem <i>e-Procurement</i> dapat berintegrasi dengan sistem yang telah ada
	Sistem <i>e-Procurement</i> memuat adanya perbaikan kontrol terhadap informasi.
	Sistem <i>e-Procurement</i> memuat adanya pengelolaan data sebagai kunci pendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa.
	Sistem <i>e-Procurement</i> memiliki standar atau aturan yang sesuai dengan prosedur teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa.
	Sistem <i>e-Procurement</i> digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan lintas fungsional.
<i>Changes in Governance Structure</i>	<i>E-Procurement</i> mengubah frekuensi pertemuan panitia dengan penyedia menjadi lebih rendah.
	<i>E-Procurement</i> mengubah proses pemeriksaan kegiatan pengadaan menjadi lebih mudah dan cepat.
	<i>E-Procurement</i> menjadikan penyedia barang dan jasa harus menaati ketentuan dan persyaratan dalam proses pengadaan, jika tidak mereka akan gagal.
	<i>E-Procurement</i> tidak menyebabkan adanya penggabungan permintaan pengadaan barang dan jasa.
	<i>E-Procurement</i> menjadikan pengadaan skala

<i>Changes to Acquisition Cost</i>	besar dapat diketahui secara persis.
	<i>E-Procurement</i> mengubah intensitas komunikasi panitia dengan penyedia barang dan jasa menjadi rendah.
	<i>E-Procurement</i> menjadikan biaya untuk pengumuman pengadaan tidak ada, karena semua pengadaan diumumkan melalui situs <i>e-Procurement</i> .
	<i>E-Procurement</i> menjadikan jumlah penyedia barang / jasa dapat diketahui secara tepat dan informasi tentang penyedia barang / jasa juga mudah didapatkan.
	<i>E-Procurement</i> tidak memberikan dampak pada konsolidasi kebijakan pengadaan.
	<i>E-Procurement</i> menawarkan harga melalui katalog elektronik (<i>e-Purchasing</i>) dan lebih menghemat harga.
<i>Changes in Organizational Characteristic</i>	Biaya permintaan pengadaan barang dan jasa tetap sama baik sebelum dan setelah pelaksanaan <i>e-Procurement</i> .
	Biaya pembelian barang dan jasa tetap sama baik sebelum dan setelah pelaksanaan <i>e-Procurement</i> .
	Pelatihan sistem <i>e-Procurement</i> tidak dilakukan oleh suatu unit khusus pada organisasi.
	<i>E-Procurement</i> dapat digunakan sebagai indikator kinerja pimpinan, prosesnya sistematis.
	Pelatihan sistem <i>e-Procurement</i> hanya dilakukan pada awal implementasi sistem dan tidak rutin dilakukan dan menjadi bagian materi pelatihan pengadaan barang dan jasa.
	<i>E-Procurement</i> sebagai aplikasi berbasis <i>web</i> yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
<i>Perception of e-Procurement</i>	<i>E-Procurement</i> menjadikan organisasi memiliki pusat layanan pengadaan di tingkat kota yang mampu mengatasi permasalahan dalam sistem.
	<i>E-Procurement</i> memberikan persepsi positif tentang sistem pengadaan barang dan jasa karena peningkatan status dan reputasi pada bagian yang menangani pengadaan.
	<i>E-Procurement</i> menjadikan organisasi melihat penting adanya layanan internal bagi pengguna untuk mengatasi masalah tentang sistem.
	<i>E-Procurement</i> mengurangi peluang korupsi dan kolusi.
	<i>E-Procurement</i> meningkatkan transparansi dalam pengadaan.
	<i>E-Procurement</i> mengurangi biaya pengadaan.
	<i>E-Procurement</i> meningkatkan kesadaran penyedia dan informasi yang masuk ke pasar.
	<i>E-Procurement</i> menghemat waktu kegiatan pengadaan.

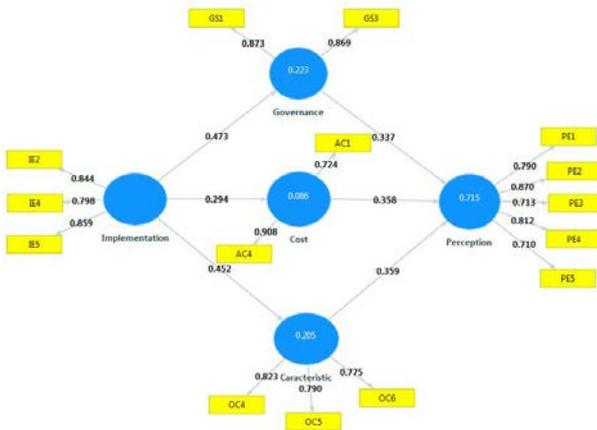
Iterasi pertama pada Gbr. 5 menunjukkan bahwa dua indikator IE (IE1 dan IE3), empat indikator GS (GS2, GS4, GS5 dan GS6), empat indikator AC (AC2, AC3, AC5 dan AC6), dan empat indikator OC (OC1, OC2, OC3 dan OC7) memiliki nilai faktor *loading* kurang dari 0,7. Karena itu, empat belas indikator dikeluarkan untuk analisis lebih lanjut. Dengan menghapus indikator tersebut maka iterasi kedua menunjukkan nilai faktor *loading*, reliabilitas indikator dengan nilai *composite reliability* yang sesuai untuk analisis lebih lanjut, tampak pada Gbr. 6. Pada Tabel II bisa dilihat

nilai *discriminant validity* dengan *cross loading* telah sesuai. Karena model pengukuran memuaskan maka model struktural dapat dianalisis.

menunjukkan koefisien determinasi (R^2) dari model. Berdasarkan analisis, nilai R^2 untuk persepsi *e-Procurement* adalah 0,72. Hal ini berarti bahwa sekitar 72 % varians persepsi *e-Procurement* disebabkan variabel dalam model.



Gbr. 5 Iterasi Pertama SmartPLS



Gbr. 6 Iterasi Kedua SmartPLS

TABEL II
DISCRIMINANT VALIDITY

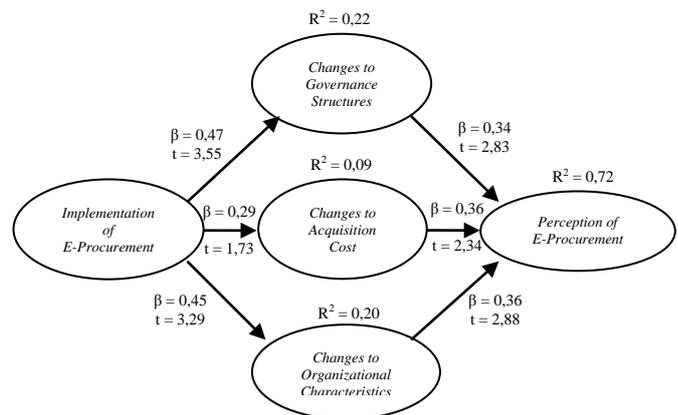
	OC	AC	GS	IE	PE
OC	0,80				
AC	0,39	0,82			
GS	0,49	0,52	0,87		
IE	0,45	0,29	0,47	0,83	
PE	0,66	0,67	0,70	0,54	0,78

2) Model Struktural

Model struktural menunjukkan hubungan antara variabel laten dalam model penelitian, sehingga secara langsung menentukan apakah hipotesis tertentu didukung oleh data yang dikumpulkan. Tabel III menyajikan hasil analisis model struktural dalam hal koefisien *path* sesuai dengan yang diberikan hipotesis. Dengan menggunakan $\alpha = 0,05$, dapat diamati bahwa semua hipotesis didukung oleh data yang dikumpulkan. Gbr. 7 menunjukkan hasil uji hipotesis dengan koefisien *path* masing-masing variabel. Gbr. 7 juga

TABEL III
PATH COEFFICIENTS

Path	Path Coefficient (β)	t value (p value)	Hipotesis
H1 : IE \rightarrow GS	0,47	t = 3,55 p = 0,000	Diterima
H2 : IE \rightarrow AC	0,29	t = 1,73 p = 0,042	Diterima
H3 : IE \rightarrow OC	0,45	t = 3,29 p = 0,001	Diterima
H4 : GS \rightarrow PE	0,34	t = 2,83 p = 0,002	Diterima
H5 : AC \rightarrow PE	0,36	t = 2,34 p = 0,010	Diterima
H6 : OC \rightarrow PE	0,36	t = 2,88 p = 0,002	Diterima



Gbr. 7 Hasil Uji Hipotesis

B. Pembahasan

Persepsi dan perilaku organisasi *e-Procurement* menjadi fokus dalam makalah ini. Enam hipotesis yang diajukan diterima berdasarkan analisis data yang diperoleh. Tiga hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap perilaku organisasi pengadaan barang dan jasa, sedangkan tiga hipotesis lainnya digunakan untuk mengetahui persepsi *e-Procurement* yang muncul dari perubahan perilaku organisasi pada implementasi *e-Procurement* di Kota Magelang.

Implementasi *e-Procurement* di Kota Magelang dilihat dari sistem spesifikasi beserta manajemen pengelolaannya seperti penelitian yang dilakukan oleh Croom dan Brandon-Jones [21]. Berdasarkan spesifikasi sistem, *e-Procurement* memuat adanya perbaikan kontrol informasi tentang kegiatan pengadaan. Salah satunya informasi tentang tahapan pelaksanaan suatu pengadaan barang dan jasa yang dapat dilihat secara sistematis. Secara operasional, *e-Procurement* memiliki standar atau aturan yang sesuai dengan prosedur teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa. Prosedur

teknis pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 [10]. Sebagai sistem untuk seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah, *e-Procurement* juga telah digunakan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah lintas fungsional di Kota Magelang.

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa implementasi *e-Procurement* berpengaruh positif terhadap perubahan struktur tata kelola pengadaan dalam organisasi. Tabel III menunjukkan bahwa nilai *path coefficient* antara *implementation of e-Procurement* dan *changes to governance structures* adalah $\beta = 0,47$ ($t = 3,55$; $p = 0,000$). Perubahan struktur tata kelola, diantaranya adalah bahwa sistem *e-Procurement* mengubah frekuensi pertemuan panitia dengan penyedia barang dan jasa menjadi lebih rendah, karena semua proses dilaksanakan secara elektronik (*web*). Selain itu, penyedia barang dan jasa harus menaati ketentuan dan persyaratan proses pengadaan yang telah ada dalam sistem. Jika penyedia tidak mengindahkan hal tersebut maka mereka dipastikan akan gagal.

Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa implementasi *e-Procurement* memiliki pengaruh positif terhadap perubahan biaya akuisisi. Tabel III menunjukkan bahwa nilai *path coefficient* antara *implementation of e-Procurement* dan *changes to acquisition cost* adalah $\beta = 0,29$ ($t = 1,73$; $p = 0,042$). Biaya akuisisi merupakan biaya yang timbul dari implementasi *e-Procurement* dibandingkan sistem yang sebelumnya. Perubahan biaya akuisisi antara lain pada tidak adanya biaya untuk pengumuman pengadaan, karena semua pengadaan diumumkan melalui situs *e-Procurement*. Sistem *e-Procurement* juga menawarkan harga melalui katalog elektronik (*e-Catalogue*) yang lebih murah dibandingkan harga pasar sehingga mampu menghemat harga.

Hipotesis 3 (H3) melihat hubungan antara implementasi *e-Procurement* dengan perubahan karakteristik organisasi. Tabel III menunjukkan bahwa nilai *path coefficient* antara *implementation of e-Procurement* dan *changes to organization characteristics* adalah $\beta = 0,45$ ($t = 3,29$; $p = 0,001$). *E-Procurement* sebagai aplikasi berbasis *web* dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga personil dalam organisasi tidak harus bertemu secara fisik dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, tetapi dapat dilakukan secara virtual. Selain itu, organisasi memiliki pusat layanan pengadaan di tingkat kota yang mampu mengatasi permasalahan dalam sistem. Pusat layanan ini berada di sekretariat LPSE Kota Magelang, yang secara teknis dikelola oleh Pusat Data Elektronik (PDE). *E-Procurement* juga memberikan persepsi positif tentang sistem pengadaan barang dan jasa karena adanya perubahan pada bagian yang menangani kegiatan tersebut, yang semula di bagian perlengkapan ke bagian pembangunan. Hal ini salah satunya untuk merintis peningkatan status LPSE sebagai unit pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa yang mandiri dan profesional di Kota Magelang.

Perubahan struktur tata kelola pengadaan memberikan persepsi yang positif tentang sistem *e-Procurement*, di antaranya peluang terjadinya korupsi dan kolusi yang menurun [26]. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya

frekuensi pertemuan antara panitia dan penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan, sehingga mengurangi interaksi antara panitia dan penyedia barang dan jasa yang dapat mengarah ke hal tersebut. Selain itu, sistem *e-Procurement* yang memuat ketentuan dan persyaratan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan, misalnya lelang, meningkatkan kesadaran penyedia barang dan jasa untuk menaatinya agar tidak sampai gagal dalam mengikuti lelang. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel III, hipotesis 4 (H4), yang menunjukkan hubungan antara perubahan struktur tata kelola dan persepsi *e-Procurement*, diterima. Bukti ditunjukkan dengan nilai *path coefficient* antara *changes to governance structures* dan *perception of e-Procurement* adalah $\beta = 0,34$ ($t = 2,83$; $p = 0,002$), yang mendukung hipotesis tersebut.

Perubahan biaya akuisisi membentuk persepsi *e-Procurement* antara lain pada berkurangnya biaya pengadaan karena tidak adanya biaya untuk pengumuman pengadaan dan harga barang dan jasa yang relatif lebih murah. Penghematan biaya menjadi salah satu dampak yang dirasakan dari implementasi *e-Procurement* [29]. Seperti hipotesis 5 (H5) yang menunjukkan hubungan antara perubahan biaya akuisisi dan persepsi *e-Procurement*, Tabel III memberikan bukti tentang hubungan tersebut dengan nilai *path coefficient* antara *changes to acquisition cost* dan *perception of e-Procurement* adalah $\beta = 0,36$ ($t = 2,34$; $p = 0,010$).

Persepsi *e-Procurement* juga terbentuk dari adanya perubahan karakteristik organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan. Sistem *e-Procurement* mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan [27], dan aplikasi sistem dapat diakses oleh siapapun secara *mobile* sehingga tahapan proses pengadaan dapat diikuti dari waktu ke waktu secara menyeluruh. Selain itu, aplikasi sistem *e-Procurement* yang memungkinkan suatu pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan tahapan yang ada memberikan dampak positif pada pemanfaatan waktu. Sistem *e-Procurement* mampu menghemat waktu pelaksanaan proses [2]. Dengan demikian untuk Hipotesis 6 (H6), *changes to organization characteristics* memberikan pengaruh positif terhadap *perception of e-Procurement*. Hubungan ini adalah bukti fakta bahwa nilai *path coefficient* antara *changes to organization characteristics* dan *perception of e-Procurement* adalah $\beta = 0,36$ ($t = 2,88$; $p = 0,002$).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Makalah ini menyusun model untuk mengetahui pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap persepsi dan perilaku organisasi pada SKPD di Kota Magelang. Dalam model ini, perilaku organisasi dimanifestasikan sebagai perubahan struktur tata kelola, perubahan total biaya akuisisi, dan perubahan karakteristik organisasi. Persepsi merupakan dampak perubahan perilaku organisasi tersebut.

Terdapat enam hipotesis yang diuji, dan semuanya diterima berdasarkan data yang diperoleh. Secara khusus, implementasi *e-Procurement* membentuk persepsi aparat pemerintah terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa, yaitu sistem dirasakan mampu mengurangi peluang korupsi dan kolusi,

meningkatkan transparansi proses pengadaan, mengurangi biaya pengadaan, meningkatkan kesadaran penyedia dan informasi yang masuk ke pasar, serta menghemat waktu kegiatan. Makalah ini menyimpulkan bahwa persepsi yang muncul pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*) berbeda dengan persepsi pengadaan secara konvensional (non-elektronik). Implementasi *e-Procurement* juga menyebabkan perubahan perilaku dalam organisasi berupa perubahan struktur tata kelola organisasi, biaya yang timbul dalam penggunaan sistem, serta karakteristik organisasi. Perubahan organisasi juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan *e-Procurement* di Kota Magelang.

Makalah ini memiliki dua keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah bahwa dalam makalah ini hanya digunakan tiga variabel sederhana untuk melihat perubahan perilaku organisasi. Penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan variabel penelitian tersebut untuk melihat perubahan perilaku organisasi yang terjadi secara lebih kompleks. Keterbatasan kedua adalah responden yang diambil sebatas pada pegawai yang terlibat dan mengelola kegiatan *e-Procurement*, untuk melihat persepsi dari sudut pandang organisasi pemerintah. Studi berikutnya dapat melihat persepsi pengguna, yaitu dengan melibatkan seluruh pihak penyedia barang dan jasa yang mengikuti kegiatan pengadaan melalui *e-Procurement*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan makalah ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Magelang khususnya tim LPSE dan ULP Kota Magelang, dosen dan karyawan Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, rekan-rekan mahasiswa CIO 2014, keluarga tercinta serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya selama ini.

REFERENSI

- [1] "Sistem E-proc Terpusat LPSE." [Online]. Available: <http://lpse.blogdetik.com/2010/01/12/sistem-e-proc-terpusat-di-beberapa-instansi/>.
- [2] A. Gunasekaran and E. W. T. Ngai, "Adoption of e-procurement in Hong Kong: An empirical research," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 113, no. 1, pp. 159–175, May 2008.
- [3] F. Wahid and M. K. Sein, "Steering Institutionalization through Institutional Work: The Case of an eProcurement System in Indonesian Local Government," *2014 47th Hawaii Int. Conf. Syst. Sci.*, pp. 4264–4274, Jan. 2014.
- [4] A. Heryandi, I. Afrianto, and Sufa'atin, "Kajian Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Menuju Arah E-Procurement," *Majalah Ilmiah Unikom Vol. 10 No. 1*, vol. 10, no. 1, pp. 41–50, 2010.
- [5] Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*. Yogyakarta: CV Primaprint, 2014.
- [6] A. T. Istiami, "Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," 2014. [Online]. Available: <http://pta.kemenag.go.id/index.php/frontend/news/index/189>.
- [7] A. S. Utama, "Pengalaman Penerapan E-Procurement Di Pemerintah Daerah (Studi Kasus : E-Procurement Pemerintah Kota Yogyakarta)," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2011.
- [8] R. S. Handini, "Analisis Implementasi E-procurement di Kabupaten Luwu Utara Sebagai bentuk Pengembangan Organisasi," 2013. [Online]. Available: <http://rilyanshandini.wordpress.com/2013/02/23/analisis-implementasi-e-procurement-di-kabupaten-luwu-utara-sebagai-bentuk-pengembangan-organisasi/>.
- [9] M. Lubis, "Pengembangan Prototipe Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Proyek Konstruksi," Tesis Universitas Islam Indonesia, 2006.
- [10] "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," no. 1. pp. 1–139, 2010.
- [11] K. Udoyono, "E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta," *J. Stud. Pemerintah.*, vol. 3 Nomer 1, pp. 127–160, 2012.
- [12] T. Adiningsih, "Efisiensi Implementasi E-Procurement Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012)," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2013.
- [13] Fachrurozin, "Analisis Manajemen Perubahan Dalam Rangka Penerapan E-Procurement Di Pemerintah Kota Yogyakarta," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2015.
- [14] D. Hardiansyah, "Analisa Kelayakan Operasional Implementasi E-Procurement," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2012.
- [15] W. N. L. Sari, "Analisis Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Kinerja Dan Efisiensi Supply Chain Management Studi Pada Pt Petrofexx Prima Daya," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2014.
- [16] I. A. Nightisabha, D. Suhardjanto, and B. T. Cahya, "Persepsi pengguna layanan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kota yogyakarta terhadap implementasi sistem," *J. Siasat Bisnis*, vol. 13 No.2, pp. 129–150, 2009.
- [17] F. D. H. Ahmad, "Evaluasi Penerapan E-Procurement Di Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan D and M IS Success Model," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2009.
- [18] M. D. Putera, "Analisis Penerimaan Pengguna Terhadap Aplikasi E-Procurement PT Pertamina EP Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2009.
- [19] M. Nasir, "Analisis Dan Evaluasi User Acceptance Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada E-Procurement Di Kabupaten Kebumen," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2011.
- [20] S. Hadinata, "Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Pada Penerapan E-Procurement Di Pemerintah Daerah," Tesis Universitas Gadjah Mada, 2012.
- [21] S. Croom and A. Brandon-Jones, "Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector," *J. Purch. Supply Manag.*, vol. 13, no. 4, pp. 294–303, Dec. 2007.
- [22] "Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Magelang." 2011.
- [23] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behaviour*, 15th ed. New York: Prentice Hall, 2013.
- [24] M. Kaliannan, M. Raman, and M. Dorasamy, "E-procurement adoption in the Malaysian public sector: Organizational perspectives," *Proc. - IEEE Int. Enterp. Distrib. Object Comput. Work. EDOC*, pp. 189–194, 2009.
- [25] N. Nurdin, "Understanding Government E-Procurement Effectiveness from Users' Perspectives," pp. 116–121, 2014.
- [26] European-Commission, "E-Procurement Reduces Opportunities For Corruption and Bribery," vol. 32, pp. 1–7, 2011.
- [27] J. C. Bertot, P. T. Jaeger, and J. M. Grimes, "Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies," *Gov. Inf. Q.*, vol. 27, no. 3, pp. 264–271, 2010.
- [28] E. G. Carayannis and D. Popescu, "Profiling a methodology for economic growth and convergence: Learning from the EU e-procurement experience for central and eastern European countries," *Technovation*, vol. 25, pp. 1–14, 2005.
- [29] N. a. Panayiotou, S. P. Gayialis, and I. P. Tatsiopoulos, "An e-procurement system for governmental purchasing," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 90, pp. 79–102, 2004.
- [30] S. R. Croom and A. Brandon-Jones, "Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and Operation in the Public Sector," *J. Public Procure.*, vol. 5, no. 3, pp. 367–387, 2005.
- [31] A. N. Hidayanto, Y. Ditari, and D. Chahyati, "Study of e-procurement implementation impacts: A case study in PT. PLN," *2012 IEEE 6th Int. Conf. Manag. Innov. Technol. ICMIT 2012*, pp. 152–157, 2012.

- [32] S. Torang, *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [33] W. Vagias, "Likert-type scale response anchors," *Clemson Int. Inst. Tour.*, pp. 3–4, 2006.
- [34] J. F. Hair, W. Black, B. Babin, and R. E. Anderson, *Multivariate Data Analysis*. New York: Pearson Prentice Hall, 2006.
- [35] J. Henseler, C. M. Ringle, and R. R. Sinkovics, "The Use Of Partial Least Squares Path Modeling In International Marketing," vol. 20. pp. 277–319, 2009.